

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang ilmu hukum adalah hukum perdata yaitu serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.¹ Sedangkan hukum perdata itu dibagi menjadi dua macam yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal.

Pada dasarnya setiap manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga ia harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya tersebut. Dalam hubungan interaksi tersebut ada yang tidak menimbulkan akibat hukum dan ada yang menimbulkan akibat hukum yaitu dengan timbulnya suatu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban inilah yang disebut hubungan hukum.

Di dalam suatu hubungan hukum terkadang terjadi dimana salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tersebut merasa dirugikan. Dengan adanya kejadian tersebut maka untuk mempertahankan haknya seperti telah diatur dalam hukum perdata materiil, seseorang harus bertindak atas peraturan hukum yang berlaku, dan apabila seseorang tidak dapat menyelesaikan sendiri dengan cara damai maka

¹ Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, halaman 325.

dapat meminta bantuan penyelesaian kepada hakim (pengadilan). Dan cara penyelesaian lewat pengadilan tersebut diatur didalam hukum perdata formal yaitu hukum acara perdata.²⁾

Menurut Sudikno Mertokusumo :

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.³⁾

Dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri terdapat beberapa acara pemeriksaan dimuka hakim, diantaranya pengajuan gugatan oleh penggugat, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, pengajuan jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan hakim dan menjalankan putusan tersebut.

Jawaban tergugat dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi;
- 2) jawaban tergugat mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*)⁴⁾

Menurut Sudikno Mertokusumo eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.⁵⁾

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung 1990, halaman 16.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, halaman 2

⁴ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*,

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 97.

Jawaban yang berupa eksepsi kecuali eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh diajukan atau dipertimbangkan secara terpisah tetapi diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara.

Menurut Wiryono Prodjodikoro eksepsi dalam pasal 136 HIR, 162 RBg itu sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan hanya mengenai soal acara belaka. Dengan demikian jawaban gugatan yang berupa eksepsi tidak menyinggung pokok perkara, sehingga harus diputus lebih dahulu sebelum hakim mengarahkan pemeriksaan kepada pokok perkara. Jadi tidak perlu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara menurut pasal 136 HIR, 162 RBg. Jika eksepsi dan pokok perkara diperiksa dan diputus secara terpisah toh tidak ada sanksinya menurut undang-undang. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut sebaiknya diartikan sebagai anjuran saja kepada tergugat agar seberapa boleh mengumpulkan segala yang ingin diajukan dalam jawaban pada waktu dia mengajukan jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara. Pengajuan eksepsi ini dapat dilakukan karena untuk menuntut batalnya suatu gugatan, ataupun tidak dikabulkannya tuntutan penggugat. Apabila eksepsi ini dikabulkan oleh majelis hakim maka perkara tersebut selesai pada tingkat pertama, apabila penggugat tidak puas atas putusan tersebut maka dapat mengajukan mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi yang bersangkutan. Tapi apabila eksepsi itu ditolak maka dijatuhkan putusan sela dan dalam putusan tersebut sekaligus diperintahkan supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut.

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa jenis eksepsi yaitu: eksepsi disqualificatoir, eksepsi peremptoir, eksepsi dillatoir, Eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi kewenangan absolut. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang eksepsi kewenangan relatif yaitu kewenangan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum atau kekuasaan mengadili antara Pengadilan Negeri. Misal gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat atau berlaku asas actor sequitor forum rei. Seperti dijelaskan pada pasal 118 HIR ayat (1) yaitu disebutkan bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal, apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang tidak tentu maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat atau tempat tinggal tinggal tetap tergugat. Akan tetapi seringkali ada kesalahan dalam pengajuan surat gugatan tersebut. Oleh karena itu apabila dalam pengajuan gugatan tersebut tergugat merasa bahwa pengajuan gugatan oleh penggugat tidak sesuai dengan tempat tinggal tergugat yang sekarang maka tergugat dapat mengajukan eksepsi.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul : **STUDI TENTANG EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN RELATIF TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).**

B. Perumusan Masalah

Di sini penulis perlu mengemukakan perumusan yang akan dibahas dalam skripsi ini, agar arah dan tujuan dari skripsi ini akan terarah. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan eksepsi kewenangan relatif sampai pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan diterima atau tidaknya eksepsi kewenangan relatif?
3. Bagaimana akibat hukum dari adanya eksepsi terhadap kewenangan relatif tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pengajuan eksepsi kewenangan relatif sampai pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan diterima atau tidaknya eksepsi kewenangan relatif.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya eksepsi terhadap kewenangan relatif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan hukum

Diharapkan dapat memberikan masukan dibidang ilmu hukum khususnya hukum acara perdata.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sehingga masyarakat akan mengetahui ke pengadilan mana gugatan tersebut akan diajukan.

3. Bagi pengadilan.

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi pengadilan khususnya bidang acara perdata mengenai eksepsi kewenangan relatif.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang eksepsi mengenai kewenangan relatif yang bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan eksepsi mengenai kewenangan relatif sampai pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan perkara di PN dan untuk mengetahui akibat hukum dari adanya eksepsi mengenai kewenangan relatif. Maka dari apa yang dikemukakan penulis di atas metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini maka penulis menggunakan penelitian deskriptif yaitu peneliti menggambarkan dan menguraikan semua data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan tema dan judul

skripsi secara jelas dan terperinci yang kemudian dianalisa guna memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan suatu penyelesaian.

Dalam hal ini penulis menggambarkan dan menguraikan dan mendeskripsikan mengenai bagaimana proses pengajuan eksepsi kewenangan relatif sampai pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan perkara di PN serta akibat hukum dari adanya eksepsi terhadap kewenangan relatif.

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif sosiologis karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum mengenai eksepsi kewenangan relatif dalam pemeriksaan perkara perdata.

c. Data Penelitian :

1) Data primer

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh dari sumbernya dimana penelitian dilakukan. Dalam hal ini data yang akan penulis kumpulkan adalah keterangan dari para hakim di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai responden.

2) Data sekunder

Adalah keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menunjang atau mendukung kelengkapan data primer. Adalah data-data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan melalui literature-literatur

maupun bacaan yang lain yang berkaitan dengan materi penelitian ini, yaitu antara lain:

- a) Berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, khususnya berkas-berkas putusan perdata yang berkaitan dengan masalah eksepsi kewenangan relatif.
- b) Peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang eksepsi yaitu HIR, RBg dan yurisprudensi.
- c) Buku-buku tentang hukum acara perdata.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta mempelajari bahan yang berupa buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2. Penelitian lapangan

Yaitu melakukan penelitian langsung ke objek penelitian melalui:

a. Observasi (pengamatan)

Yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung pada objek penelitian dalam hal ini sidang di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Wawancara

Merupakan penelitian tanya jawab lesan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung atau fisik. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, sebab dianggap lebih sesuai dan memadai untuk menyimpulkan data yang benar sesuai dengan kenyataan. Wawancara dilakukan terhadap para hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata khususnya eksepsi mengenai kewenangan relatif.

c. Quesioner

Tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan para hakim yang pernah memeriksa atau memutus perkara yang berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan relatif.

G. Metode Analisis Data

Tahap analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Teknik analisis data tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk uraian yang mendalam dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan membandingkan peraturan yang meliputi putusan hakim (yurisprudensi) dan peraturan yang ada hubungannya dengan eksepsi dengan buku bacaan tentang

eksepsi mengenai kewenangan relatif kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang seluruh aspek yang berhubungan dengan eksepsi mengenai kewenangan relatif. Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan interview dari responden sehingga dapat gambaran lengkap mengenai eksepsi relatif. Kemudian dianalisis secara kualitatif dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Metode Analisa Data
- H. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Eksepsi
 - 1. Eksepsi
 - 2. Dasar hukum eksepsi

B. Tinjauan Tentang Eksepsi Kewenangan Relatif

1. Eksepsi kewenangan relatif
2. Proses pengajuan eksepsi kewenangan relatif

C. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian Perkara

1. Menyusun surat gugatan
2. Pengajuan surat gugatan ke pengadilan negeri
3. Pemanggilan pihak yang berperkara
4. Pelaksanaan sita jaminan
5. Proses pemeriksaan perkara
6. Pembuktian
7. Putusan
8. Eksepsi kewenangan relatif terhadap pemeriksaan perkara perdata

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pengajuan eksepsi kewenangan relatif sampai pada pelaksanaannya dalam pemeriksaan perkara di PN
- B. Pertimbangan hakim dalam menentukan diterima atau tidaknya eksepsi kewenangan relatif
- C. Akibat Hukum dari adanya eksepsi terhadap kewenangan relatif

BAB IV PENUTUP

- A Kesimpulan
- B Saran